



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

FENOMENA KELANGKAAN DAN KENAIKAN HARGA MINYAKITA

Yosephus Mainake

Analisis Legislatif Ahli Pertama
yosephus.mainake@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Menjelang puasa bulan Ramadan, keberadaan minyak goreng kemasan murah Minyakita di sejumlah daerah dikabarkan mengalami kelangkaan. Minyakita yang tersedia harganya dibanderol tinggi mencapai Rp20.000 per liter. Harga minyak goreng terpantau bergerak naik dalam beberapa pekan terakhir melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per liter, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menduga adanya pemain dalam perdagangan minyak goreng yang sengaja membuat pasokan Minyakita langka. Pihaknya berharap pemerintah dapat mengurai kondisi tersebut sehingga tidak ada pihak tertentu yang sengaja membuat harga minyak goreng untuk rakyat kecil mengalami kenaikan.

Terdapat beberapa fakta terkait kelangkaan minyak goreng Minyakita pada saat menjelang Ramadan 2023. *Pertama*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memaparkan hasil investigasi awal soal penyebab kelangkaan minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita. Direktur Ekonomi KPPU, Mulyawan Ranamanggala menduga ada akal-akalan produsen minyak sawit dalam mengatur pasokan Minyakita sehingga harganya naik dan sulit ditemukan di pasaran. *Kedua*, Seperti halnya hasil investigasi KPPU, dugaan yang sama juga disampaikan oleh IKAPPI. Ketua bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP IKAPPI Ahmad Choirul Furqon menilai, kondisi ini tidak wajar atau terdapat sebuah anomali lantaran memasuki momentum pemilu dan bulan Ramadan. *Ketiga*, Merespons langkanya minyak goreng Minyakita di pasaran menjelang puasa Ramadan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan telah mengambil langkah agar stok minyak goreng di dalam negeri bertambah. Kebijakan yang ia tetapkan adalah menaikkan *Domestic Market Obligation* (DMO). *Keempat*, Selain menaikkan DMO minyak sawit mentah, Mendag Zulhas menyatakan pemerintah dan produsen akan menambah suplai minyak goreng kemasan dan curah sebanyak 450 ribu ton per bulan. Penyaluran itu akan dilakukan selama tiga bulan, mulai Februari hingga April 2023. Zulhas menilai upaya tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat selama memasuki bulan puasa hingga Lebaran 2023. *Kelima*, Diberitakan Tempo, agar masyarakat tidak memborong Minyakita sehingga menimbulkan kelangkaan di pasar, Zulhas mengeluarkan aturan terbaru. Ia mewajibkan tiap pembeli Minyakita untuk menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) saat bertransaksi. Pembeli juga dibatasi maksimal hanya boleh membeli 5 kilogram. Selain itu, pembeli dilarang memborong Minyakita untuk dijual kembali.

Pemerintah telah mengatur tata kelola program minyak goreng curah rakyat, termasuk Minyakita, melalui Permendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat, dimana setiap pelaku usaha sawit wajib melakukan DMO minyak sawit untuk memproduksi minyak goreng curah maupun Minyakita sebelum melakukan ekspor. Seharusnya, dengan regulasi tersebut, tidak ada lagi persoalan ketersediaan stok minyak goreng di dalam negeri sehingga tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan selisih harga terlalu tinggi. Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat. Selain memastikan kembali HET minyak goreng, aturan ini melarang penjualan minyak goreng rakyat secara *bundling*.

Atensi DPR

Kebijakan stabilisasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng melalui Program Minyak Goreng Rakyat sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, serta sebagai langkah antisipatif periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa – Lebaran 1444H/2023, Kemendag telah meningkatkan target penyediaan DMO dan mengalihkan hak ekspor yang telah dimiliki produsen CPO sebagai deposit yang baru bisa digunakan pada bulan Mei 2023. Selain itu, Kemendag telah menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh pelaku usaha Minyak Goreng yang berisikan penegasan kembali HET serta larangan penjualan secara *online* dan pembatasan kuantitas penjualan. Oleh karena itu, DPR RI, khususnya Komisi VI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan serta evaluasi terhadap pemenuhan DMO dalam bentuk Minyakita oleh produsen. Selain itu, Kemendag perlu melakukan pengawasan secara rutin di loka pasar dan media sosial terkait penjualan Minyakita yang dijual di atas HET dan tidak disertai pembatasan penjualan sehingga berpotensi menimbulkan praktik penjualan kembali.

Sumber

Bahan Rapat Kerja Komisi VI, 15 Maret 2023;
bisnis.tempo dan cnbcindonesia.com, 19 Maret 2023;
republika.id, 20 Maret 2023.

Minggu ke-3 Maret
(16 s.d. 22 Maret 2023)



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyantri
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

©PuslitBK2022